

## KEBERADAAN PERMUKIMAN LIAR DI RT 07 KELURAHAN KAMPUNG BUGIS

Ni Putu Mas Puspita Dewi <sup>1</sup>, I Putu Agus Suhendra Adi Putra <sup>2</sup>

<sup>1</sup> Jurusan Pendidikan Geografi, Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja, Indonesia

<sup>2</sup> Jurusan Pendidikan Geografi, Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja, Indonesia

---

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pembentukan permukiman liar di RT 07 Kelurahan Kampung Bugis, pengaruh keberadaan permukiman liar di RT 07 Kelurahan Kampung Bugis terhadap permukiman di sekitarnya dan pengaruh permukiman liar secara umum di Kota Singaraja. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yaitu dengan memberikan deskripsi secara rinci mengenai karakteristik objek wisata kajian. Hasil dari kajian tersebut proses terbentuknya permukiman liar di RT 07 Kampung Bugis di Kota Singaraja diawali dengan kedatangan Suku Bugis ke Singaraja setelah dibangunnya pelabuhan dagang di Kota Singaraja oleh pemerintah Belanda. Adapun pengaruh dari keberadaan permukiman liar di RT 07 Kelurahan Kampung Bugis terhadap permukiman di sekitarnya antara lain yaitu (1) garis sempadan pantai yang ada di sana berkurang, (2) terciptanya permukiman kumuh di daerah tersebut, dan (3) mengganggu keindahan panorama pantai yang ada di sana. Keberadaan permukiman liar secara umum memberi dampak negatif terhadap tata ruang Kota Singaraja, dampak yang diakibatkan adalah degradasi lingkungan hidup dan degradasi kehidupan sosial.

### Keywords:

*Keberadaan,  
Permukiman, Liar*

---

### 1. Pendahuluan

Salah satu masalah yang dihadapi negara-negara berkembang dewasa ini adalah pertumbuhan penduduk yang sangat pesat terutama pada daerah perkotaan. Meningkatnya jumlah penduduk pada suatu daerah ini terjadi bukan hanya disebabkan oleh pertumbuhan penduduk kota secara alamiah tetapi juga diakibatkan oleh adanya daya tarik dan daya dorong untuk melakukan migrasi ke daerah tujuan. Misalnya di daerah asal orang yang melakukan migrasi tersebut didorong oleh faktor keterbatasan lahan pekerjaan. Sedangkan daya tarik daerah tujuan itu dapat berupa lapangan pekerjaan dan banyak fasilitas yang menunjang. Perpindahan migran dari tempat asal ke tempat tujuan migrasi tersebut tidak diimbangi oleh ketersediaan lapangan kerja yang sesuai dengan kemampuan para migran, sehingga mempengaruhi perekonomiannya. Kondisi perekonomian migran dan terbatasnya lahan yang tidak memadai memaksa migran memanfaatkan lahan kosong seperti jalur-jalur hijau, daerah pinggiran sungai dan daerah pinggiran pantai untuk membangun tempat bermukim. Keberadaan permukiman liar dapat kita jumpai di sepanjang pinggiran sungai dan sepanjang pesisir pantai di daerah perkotaan. Di perkotaan banyak dijumpai permukiman liar terutama di daerah kawasan pesisir. Karena

daerah kawasan pesisir dianggap dapat memenuhi beberapa kebutuhan migran khususnya profesi sebagai nelayan seperti kebutuhan akan lahan atau tempat tinggal serta dekatnya aktivitas pekerjaan.

Migran membangun tempat tinggal di sepanjang pinggiran pantai yang seharusnya dibiarkan kosong karena memang peruntukannya sebagai ruang terbuka hijau. Seiring dengan perkembangan jumlah penduduk yang terus meningkat khususnya di kota, seperti halnya di Kota Singaraja menyebabkan kebutuhan lahan untuk permukiman semakin bertambah. Hal tersebut tidak terlepas dari adanya daya tarik daerah tujuan dan daya dorong daerah asal untuk mencari penghidupan dan bertempat tinggal, baik permanen ataupun non permanen. Salah satu permukiman yang terdapat di Kota Singaraja di sekitar Pelabuhan Buleleng yang notabene penduduknya merupakan pendatang dari luar Bali yang membangun permukiman di daerah tersebut. Terbentuknya permukiman pendatang tersebut salah satunya dari adanya pendatang dari Suku Bugis yang memukimi di sebelah barat Pelabuhan Buleleng. Hal tersebut tidak terlepas dari mata pencaharian penduduk Kampung Bugis itu sendiri yang dominan sebagai pedagang dan nelayan, sehingga mereka membuat tempat tinggal yang dekat dengan tempat mereka beraktivitas sehari-hari, meskipun mereka tidak mengetahui di lahan milik siapa mereka mendirikan permukiman tersebut. Seiring dengan berjalannya waktu, tidak sedikit perubahan yang telah terjadi di permukiman Suku Bugis, di sebelah barat dari Pelabuhan Buleleng, yang kini dikenal dan termasuk wilayah RT 07, Kelurahan Kampung Bugis. Namun, di tengah begitu banyaknya perubahan yang telah terjadi tentu masih ada yang tidak berubah dari permukiman di RT 07 Kelurahan Kampung Bugis. Sehingga untuk lebih jelasnya akan dijelaskan dalam makalah ini yang berjudul sebagai berikut "Keberadaan Permukiman Liar di RT 07 Kelurahan Kampung Bugis dalam Tata Ruang Kota Singaraja". Adapun tujuan penulisan makalah ini adalah sebagai berikut.

- 1) Untuk mengetahui proses pembentukan permukiman liar di RT 07 Kelurahan Kampung Bugis.
- 2) Untuk mengetahui pengaruh keberadaan permukiman liar di RT 07 Kelurahan Kampung Bugis terhadap permukiman di sekitarnya dan pengaruh permukiman liar secara umum di Kota Singaraja.

## **2. Metode**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisa deskriptif kualitatif yaitu dengan cara memberikan gambaran secara rinci mengenai objek wisata lokasi penelitian dengan mengacu pada hasil literasi referensi yang memiliki keterkaitan dengan topik kajian dan observasi langsung pada lokasi penelitian.

## **3. Hasil dan Pembahasan**

### **A. Proses Terbentuknya Permukiman Liar di RT 07 Kelurahan Kampung Bugis**

RT 07 merupakan salah satu RT yang ada di kelurahan Kampung Bugis di bagian utara dari Kota Singaraja. Adapun batas administrasi dari RT 07 Kelurahan Kampung Bugis yaitu sebelah utara berbatasan langsung dengan laut Bali, sebelah timur Pelabuhan Buleleng dan Tukad Buleleng, di sebelah selatan berbatasan dengan kelurahan Kampung Kajanan dan di sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Kampung Anyar. Berdasarkan wawancara langsung dengan Bapak Tumiran, selaku Ketua RT 07, kelurahan Kampung Bugis, penulis dapat menyampaikan bahwa proses terbentuknya permukiman di sana merupakan proses infiltrasi yang diawali dengan kedatangan Suku Bugis ke Singaraja setelah dibangunnya pelabuhan dagang di Kota Singaraja oleh

pemerintah Belanda. Aktivitas bongkar muat barang dan penumpang di Pelabuhan Buleleng. Pada saat itu banyak para pedagang berdatangan ke Kota Singaraja untuk berdagang. Di antaranya ada kaum pendatang dari negeri Cina, India, Arab, dan kaum pendatang dari wilayah Indonesia sendiri seperti Suku Bugis yang sekarang mendiami wilayah di sebelah barat bekas pelabuhan Buleleng tersebut.

Akibat semakin banyaknya kaum pendatang yang menetap di Singaraja maka areal kawasan daerah pesisir pantai banyak dimanfaatkan untuk permukiman. Lambat laun akibat semakin banyaknya kaum Bugis yang datang dan bertempat tinggal disana, serta adanya pertumbuhan penduduk alami dari proses kelahiran maka terbentuklah kompleks warga Suku Bugis. Jika dilihat dari proses terbentuknya permukiman di RT 07 Kelurahan Kampung Bugis dapat dinyatakan sebagai proses memukimi yang dilakukan masyarakat Suku Bugis di sebelah barat Pelabuhan Buleleng. Karena dilakukan oleh masyarakat secara perorangan dan dilakukan secara bertahap. Dan sampai saat ini permukiman yang ada di RT 07 Kelurahan Kampung Bugis masih berstatus illegal, karena lahan yang di tempati dan dibangun permukiman oleh itu adalah milik negara. Terbentuknya permukiman liar tersebut dipengaruhi juga oleh beberapa faktor. Faktor-faktor yang mempengaruhi terbangunnya permukiman liar seperti pertumbuhan ekonomi yang lambat, program pembangunan perumahan rakyat yang tak berjalan mulus, sosial ekonomi, pendidikan dan keahlian, aksesibilitas, pengawasan tanah kurang ketat, kurangnya pengetahuan dan kesadaarn hukum, dan ketersediaan lahan.

#### 1. Pertumbuhan Ekonomi yang Lambat

Pertumbuhan penduduk yang pesat jika tidak diimbangi dengan pertumbuhan ekonomi negara yang juga pesat akan berdampak kepada munculnya tingkat kemiskinan rakyat. Rakyat akan sulit mendapatkan pekerjaan sehingga kualitas kehidupannya akan menurun pula. Rakyat akan sulit membangun rumah secara layak, mahalnya biaya pendidikan juga sulitnya pemenuhan gizi keluarga yang baik. Situasi itu memaksa rakyat mendekati sentra perekonomian di kota-kota besar tanpa memperhitungkan akan dimana mereka bermukim. Dalam benak mereka berteduh adalah permasalahan yang tidak perlu ideal yang terpenting mereka bisa makan dan bertahan hidup, di kolong jembatan atau pinggir kali sekalipun.

#### 2. Program Pembangunan Perumahan Rakyat yang Tak Berjalan Mulus

Pemerintah melalui dinas terkait selayaknya mempunyai program pintar dalam menyediakan fasilitas perumahan atau pemukiman bagi rakyat. Program tersebut haruslah bijaksana dan menyentuh seluruh kemampuan strata ekonomi rakyat. Setiap perkotaan tentu akan berbeda dalam programnya, hal itu tergantung dari tingkat ekonomi kerakyatan yang dominan di kota tersebut. Tidak mungkin menyediakan *Real Estate* di sebuah kota yang tingkat perekonomian penduduknya masih dibawah rata-rata. Justru perumahan sederhana namun manusiawilah yang banyak dibutuhkan oleh penduduk kota itu. Untuk perkotaan yang sudah maju sebaiknya pembagian area perumahan diterapkan. Tidak bisa menyatukan pemukiman mewah dengan pemukiman sederhana. Selain dampak kesenjangan sosial juga akan memicu ketegangan sosial pula. Pola hidup yang sudah jauh berbeda tidak bisa begitu saja disatukan dalam kesatuan wilayah pemukiman. Pemisahan itu bukanlah membedakan mereka tetapi justru memberikan peluang bagi pemukiman sederhana untuk bisa lebih berkembang di kemudian hari. Pembangunan rumah sederhana masih jauh mencukupi dibandingkan permintaan penduduk akan ketersediaan perumahan di perkotaan.

#### 3. Sosial Ekonomi

Pada umumnya banyak penduduk yang mempunyai tingkat pendapatan rendah karena terbatasnya akses terhadap lapangan pekerjaan. Pendapatan yang rendah ini mempengaruhi

daya beli penduduk dan mengurangi akses pelayanan sarana dan prasarana dasar penduduk. Ketidakmampuan sosial ekonomi, dapat mendorong masyarakat menempati lahan kosong milik pemerintah atau milik publik yang dapat dikatakan sebagai hunian illegal atau liar.

#### 4. Pendidikan dan Keahlian

Pendidikan dan keahlian adalah salah satu faktor penentu dalam hal pencapaian pekerjaan dan pendapatan. Banyak migran tidak dapat bekerja dengan standar yang ditetapkan karena pendidikan dan keahlian yang dimilikinya rendah. Persaingan dalam mencari pekerjaan sangat tinggi dan menuntut profesionalisme, pendidikan dan keahlian yang berstandar serta dapat bersaing dengan orang lain. Persaingan seperti ini semakin menekan penduduk yang pendidikan dan keterampilannya kurang dalam mencari pekerjaan, dampak dari akumulasi kejadian ini akan memunculkan pengangguran yang semakin bertambah setiap tahunnya.

#### 5. Aksesibilitas

Aksesibilitas juga dapat menjadi faktor terbentuknya permukiman liar. Terbatasnya akses penduduk miskin terhadap kapital komunitas seperti kapital terbangun, individu dan sosial, serta lingkungan alam. Kapital terbangun ini meliputi informasi, jalan, sanitasi, ruang terbuka, perumahan, bangunan pelayanan publik, dan sebagainya. Kapital individu meliputi kesehatan, pendidikan, kemampuan dan keterampilan. Kapital sosial meliputi konektivitas dalam suatu komunitas. Kapital lingkungan alam meliputi sumber daya alam dan estetika alam.

#### 6. Pengawasan Tanah Kurang Ketat

Pengawasan tanah yang kurang ketat merupakan penyebab bertambahnya permukiman liar di perkotaan, karena banyaknya lahan kosong di perkotaan yang biasanya di peruntukan lainnya yang sebenarnya sudah direncanakan untuk mendukung kegiatan suatu kota. Mereka yang tidak mengerti akan hal tersebut dengan keadaan ekonomi yang lemah atau dengan penghasilan yang rendah membangun rumah di tempat-tempat kosong tersebut.

#### 7. Kurangnya Pengetahuan dan Kesadaran Hukum

Kurangnya pengetahuan dan kesadaran akan hukum yang menyebabkan mereka membangun rumah seenaknya. Mereka tidak mengetahui akibat dari yang mereka lakukan itu membuat lingkungan menjadi kotor dan lingkungan menjadi terancam bahkan merugikan banyak pihak.

#### 8. Ketersediaan Lahan

Lahan merupakan sumber daya alam yang bersifat langka terlebih di wilayah perkotaan dan lahan merupakan salah satu komponen pokok pembangunan fisik di wilayah perkotaan yang sedianya semakin terbatas seiring dengan tuntutan kebutuhan yang semakin bertingkat. Di wilayah perkotaan permasalahan lahan semakin kompleks. Laju pertumbuhan penduduk yang berlangsung pesat tentunya menuntut berbagai fasilitas bagi kehidupan dan penghidupan. Pada gilirannya tuntutan penyediaan fasilitas tersebut bermuara pada meningkatnya permintaan lahan. Pada hal di lain pihak ketersediaan lahan perkotaan terutama lahan kosong sulit diperoleh. Dengan keterbatasan lahan dan pertambahan penduduk di perkotaan maka akan terjadi persaingan untuk mendapatkan sebidang tanah dijadikan perumahan. Dengan harga lahan yang tinggi mereka yang berpenghasilan rendah tidak sanggup membeli rumah karena harga rumah yang sekarang cukup mahal.

### **B. Pengaruh Keberadaan Permukiman Liar di RT 07 Kelurahan Kampung Bugis**

Permukiman liar, secara umum didefinisikan sebagai suatu kawasan permukiman yang terbangun pada lahan kosong "liar" di kota baik milik swasta ataupun pemerintah tanpa hak yang legal terhadap lahan dan/atau izin dari penguasa yang membangun, didiami oleh orang yang sangat miskin yang tidak mempunyai akses terhadap pemilikan lahan tetap. Adapun pengaruh

dari keberadaan permukiman liar di RT 07 Kelurahan Kampung Bugis terhadap permukiman yang ada di sekitarnya antara lain yaitu :

1. Garis sempadan pantai yang ada di sana berkurang,
2. Terciptanya permukiman kumuh di daerah tersebut, dan
3. Mengganggu keindahan panorama pantai yang ada di sana,

Keberadaan permukiman liar secara umum memberi dampak negatif terhadap tata ruang Kota Singaraja, dampak yang diakibatkan adalah degradasi lingkungan hidup dan degradasi kehidupan sosial. Degradasi lingkungan hidup ini merupakan penurunan kualitas lingkungan itu sendiri. Masalah-masalah yang timbul dapat dilihat dari ruang terbuka hijau yang semakin berkurang, drainase semakin buruk, sirkulasi terganggu, menurunnya tingkat kesehatan masyarakat.

#### 1. Ruang Terbuka Hijau Berkurang

Berkurangnya Ruang Terbuka Hijau (RTH) dapat mengganggu fungsi RTH secara ekologis, dimana secara ekologis RTH dapat meningkatkan kualitas air tanah, mencegah banjir, mengurangi polusi dan menurunkan temperatur kota.

#### 2. Drainase Semakin Buruk

Permukiman yang tidak dirancang dengan baik akan mengganggu sistem drainase di daerah permukiman itu sendiri, dimana drainase ini berfungsi sebagai saluran penyerapan air ke dalam tanah, yang pada akhirnya akan mengakibatkan banjir di daerah tersebut.

#### 3. Sirkulasi Terganggu

Sirkulasi transportasi di suatu daerah akan terganggu jika permukiman liar berada pada jalur transportasi, seperti jalur kereta api dan pinggir jalan tol.

#### 4. Tingkat Kesehatan Masyarakat Menurun

Areal yang difungsikan sebagai permukiman liar tersebut, bukanlah lahan pribadi yang dimiliki oleh pemukim. Secara tidak langsung, rasa bertanggung jawab dari pemukim tersebut sangat kurang, maka dari itu kualitas lingkungan di daerah tersebut sangat rendah. Kualitas lingkungan yang rendah ini dapat mempengaruhi tingkat kesehatan masyarakat semakin menurun. Degradasi kehidupan sosial merupakan suatu penurunan kualitas kehidupan sosial yang dialami oleh penduduk atau masyarakat sebagai penghuni permukiman liar, yang termasuk di dalam degradasi kehidupan sosial adalah meningkatnya kriminalitas, dan bertambahnya pengemis di lingkungan tersebut.

#### 1. Kriminalitas Meningkat

Individu yang tinggal di permukiman liar tersebut, sebagian besar berasal dari desa dan cenderung individu yang datang tidak mempunyai kemampuan atau kemampuannya kurang. Hal ini dapat mempengaruhi individu tersebut dalam mendapatkan pekerjaan. Dengan kondisi lingkungan yang tidak baik, akan mempengaruhi pola pikir individu tersebut menjadi keras, jika individu tersebut tidak berhasil dalam mendapatkan pekerjaan, secara tidak langsung mereka terpancing untuk melakukan tindakan kriminal.

#### 2. Bertambahnya Pengemis

Skill dan pendidikan yang rendah, tidak mampu bersaing akan mendorong penghuni dari permukiman liar yang ada di perkotaan untuk melakukan aktivitas mengemis.

## 4. Simpulan dan Saran

Proses terbentuknya permukiman liar di RT 07 Kampung Bugis di Kota Singaraja diawali dengan kedatangan Suku Bugis ke Singarja setelah dibangunnya pelabuhan dagang di Kota

Singaraja oleh pemerintah Belanda. Akibat semakin banyaknya kaum pendatang yang menetap di Singaraja maka areal kawasan daerah pesisir pantai banyak dimanfaatkan untuk permukiman. Jika dilihat dari proses terbentuknya permukiman di RT 07 Kelurahan Kampung Bugis dapat dinyatakan sebagai proses memukimi yang dilakukan masyarakat Suku Bugis di sebelah barat Pelabuhan Buleleng. Karena dilakukan oleh masyarakat secara perorangan dan dilakukan secara bertahap. Adapun pengaruh dari keberadaan permukiman liar di RT 07 Kelurahan Kampung Bugis terhadap permukiman di sekitarnya antara lain yaitu (1) garis sempadan pantai yang ada di sana berkurang, (2) terciptanya permukiman kumuh di daerah tersebut, dan (3) mengganggu keindahan panorama pantai yang ada di sana. Keberadaan permukiman liar secara umum memberi dampak negatif terhadap tata ruang Kota Singaraja, dampak yang diakibatkan adalah degradasi lingkungan hidup dan degradasi kehidupan sosial.

### Daftar Pustaka

- Anonim. 2011. dalam <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/27716/3/Chapter%20II.pdf> diakses pada tanggal 29 Februari 2012
- Wesnawa, I Gede Astra. 2010. *Pengantar Geografi Permukiman*. Jurusan Pendidikan Geografi. Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Pendidikan Ganesha. Singaraja
- Departemen Pekerjaan Umum. 2005. *Ruang Terbuka Hijau (RTH) Wilayah Perkotaan*. dalam <http://www.penataanruang.net/taru/Makalah/051130-rth.pdf> diakses pada tanggal 4 Maret 2012
- Christiawan, I Putu Indra. 2011. *Geografi Permukiman*. dalam <http://www.scribd.com/doc/59126924/geo-permukiman> diakses tanggal 1 Maret 2012
- Usop, Tari Budayanti. 2003. *Evaluasi Rencana Teknik Ruang Kawasan Khusus Permukiman Flamboyan Bawah Danau Seha Kota Palangka Raya*. dalam [http://eprints.undip.ac.id/17876/1/TARI\\_BUDAYANTI\\_USOP.pdf](http://eprints.undip.ac.id/17876/1/TARI_BUDAYANTI_USOP.pdf) diakses tanggal 3 Maret 2012